



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
8. Indikator Kinerja Utama (**Key Performance Indicator**) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi,
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan,
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan,
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencenninkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini, acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kota Makassar Tahun 2009-2013,
- (2) Indikator kineja utama pada setiap SKPD meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai Indikator

kinerja utama pada SKPD yang sebelum menetapkan Target dan Sasaran Strategis yang jelas berdasarkan Renstra SKPD.

- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2)) merupakan acuan yang digunakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahun;
 - b. Menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala SKPD melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, **Inspektorat** diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit kerja dalam rangka meyakinkan kedalaman informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Walikota.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

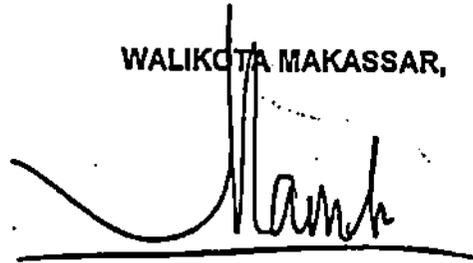
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 1 Maret 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal: 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 11

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2014**

(1)	(2)	(3)	PROGRAM STRATEGIS		(6)	(7)		
			(4)	(5)				
MAKASSAR MENUJU KOTA DUNIA BERLANDAS KEARIFAN LOKAL	Mewujudkan Warga Kota Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berdaya Saing dan Bermartabat	Pembangunan Kualitas Manusia	1	Peningkatan kualitas pendidikan	1	APK PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak dibagi Jumlah penduduk usia 4-6 Tahun kali 100%
					2	APM PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa usia 4-6 tahun pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dibagi Jumlah anak usia 4-6 tahun kali 100%
					3	APK SMP/MTs/SMPLB	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun dikali 100%
					4	APK SD/MI/SDLB	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun dikali 100%
					5	APM SMP/MTs/SMPL	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs/SMLB dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun kali 100%
					6	Persentase peserta didik putus sekolah (APIS) SD/MI/SDLB 0,7 %	Dinas Pendidikan	Jumlah Putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI dibagi Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD. 1 pd thn ajaran sebelumnya di kali 100 %
					7	Persentase peserta didik putus sekolah (APIS) SMP/MTs/SMLB 1%	Dinas Pendidikan	Jumlah Putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs/SMLB dibagi Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs/SMLB pd thn ajaran sebelumnya di kali 100 %
					8	Rata-rata hasil UASBN SD/MT/SDLB	Dinas Pendidikan	Jumlah Total hasil UASBN SD/MT/SDLB dibagi Jumlah Peserta UASBN SD/MT/SDLB dikali 100%
					9	Rata-rata hasil UN SMP/MTs/ SMPLB	Dinas Pendidikan	Jumlah Total hasil UASBN SD/MT/SDLB dibagi Jumlah Peserta UASBN SD/MT/SDLB dikali 100%
					10	Persentase SD/SDLB telah berakreditasi	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SD/SDLB berakreditasi dibagi Jumlah lembaga SD/SDLB dibagi 100%
					11	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SD/SDLB berakreditasi B dibagi Jumlah lembaga SD/SDLB dibagi 100%
					12	Persentase SMP/SMPLB telah berakreditasi	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SMP/SMPLB berakreditasi dibagi jumlah Jumlah lembaga SMP/SMPLB dikali 100%
					13	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SMP/SMPLB berakreditasi B dibagi jumlah Jumlah lembaga SMP/SMPLB dikali 100%
					14	APK SMA/MA/SMALB/SMK, Paket C	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun di kali 100%
					15	APM SMA/MA/SMALB/SMK, Paket C	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK, Paket C dibagi Jumlah anak usia 16-18 tahun kali 100%
					16	Persentase peserta didik putus sekolah (APIS) SMA/MA/SMALB/SMK	Dinas Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah pada Jenng SMA/MA/SMALB/SMK dibagi Jumlah siswa pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK pd tahun ajaran sebelumnya dikali 100%
					17	Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA/MA/SMALB/ SMK	Dinas Pendidikan	Jumlah Total hasil UN SMA/MA/SMALB/SMK dibagi Jumlah Peserta UN SMA/MA/SMALB/SMK dikali 100%
					18	Persentase SMA/SMALB telah Berakreditasi	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SMA/SMALB berakreditasi dibagi jumlah Jumlah lembaga SMA/SMALB dikali 100%
					19	Persentase SMA/SMALB berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga SMA/SMALB berakreditasi B dibagi jumlah Jumlah lembaga SMA/SMALB dikali 100%
					20	Persentase SMK telah berakreditasi	Dinas Pendidikan	Jumlah SMK berakreditasi dibagi jumlah Jumlah SMK dikali 100%
					21	Persentase SMK berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	Jumlah SMK berakreditasi B dibagi jumlah Jumlah SMK dikali 100%
			2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Cukup Jelas

VISI	MISI	KEPERLUAN	PROGRAM STRATEGIS		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR/INERDIA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2 Angka kematian ibu melahirkan	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional : Kematian Ibu adalah kematian perempuan saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penggolokannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Kunjungan Ibu Hamil (K4) dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama
				3 Angka kematian bayi	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional: kematian Bayi adalah Kematian yang terjadi sebelum mencapai usia satu tahun. Jumlah Bayi (Benumur < 1 Tahun) yang meninggal disuatu Wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah pada kurun Waktu yang sama
				4 Prevalensi gizi buruk	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional : Gizi Buruk adalah jumlah Balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-Score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda Klinis (Marasmus, Kwashiorkor dan Marasmus-Kwashiorkor) Jumlah balita Gizi Buruk yang ditemukan pada tempat dan kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Balita yang ditimbang pada tempat dan periode waktu yang sama
				5 Prevalensi gizi kurang	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional : Gizi Kurang adalah jumlah Balita dengan status Gizi menurut Berat Badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score, -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, Kwashiorkor dan Marasmus-Kwashiorkor) Jumlah Balita Gizi kurang yang ditemukan pada tempat dan kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Balita yang ditimbang pada tempat dan periode waktu yang sama
				6 Cakupan ibu hamil K4	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional : Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh pelayanan kesehatan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah Kunjungan Ibu Hamil(K4) dibagi Jumlah Sasaran Ibu Hamil dalam satu tahun

VISI	MISI	KEBIJAKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			JURATAN	INDIKATOR KINEERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				7 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang tertangani	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional :Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani adalah Neonatus dengan Komplikasi disatu Wilayah Kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih diseluruh sarana pelayanan Kesehatan. Jumlah Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani dibagi Jumlah Seluruh Neonatus dengan Komplikasi yang ada
				8 Cakupan MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Cakupan MP-ASI pada anak usia 6-24 Bulan adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan selama 90 Hari. Jumlah anak usia 6-24 Bulan yang mendapat MP-ASI dibagi Jumlah seluruh anak usia 6-24 Bulan
				9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Gizi Buruk adalah Jumlah Balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-Score <3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (Marasmus,Kwashiorkor dan Masrasmsmus -kwashorkor) Jumlah balita Gizi Buruk yang dirawat disarana pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
				10 Persentase desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani oleh Kabupaten/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu Jumlah KLB Desa/Kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu dibagi Jumlah KLB Desa/Kelurahan yang terjadi pada periode sama
				11 Persentase tempat-tempat umum sehat	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Adalah Suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti hotel, terminal, pasar, bioskop, tempat ibadah, tempat wisata, restoran dll, yang telah memenuhi pemasyarakat kesehatan yakni terpenuhi akses sanitasi dasar (air, jamban, limbah, sampah) terlaksananya pengendalian vektor, higienesanitasi makmin, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria, persyaratan dan atau standar kesehatan Jumlah tempat umum yang diawasi yang memenuhi syarat hygiene sanitasi dibagi Jumlah tempat umum yang diawasi

VISI	MISI	KEBIJAKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKPD/PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				12 Penurunan kasus diare	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Penemuan kasus diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama
				13 Penurunan kasus DBD	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional :Kasus DBD penderita DBD Penemuan kasus diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun Jumlah penderita DBD dibagi Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama
				14 Angka penemuan TB Paru	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional :Angka Penemuan Penderita Tuberkulosis BTA Positif adalah presentase jumlah penderitabarut TB BTA Positif yang ditemukan dibanding dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam waktu tertentu dalam kurun waktu satu tahun Jumlah pasien baru TB BTA yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi Jumlah perkiraan pasien baru TB TBA yang diperkirakan ada dalam wiyalah tersebut
				15 Angka penemuan penyakit kusta	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Angka Penemuan Penyakit Kusta adalah jumlah penderita kusta yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu Jumlah penderita kusta yang ditemukan pada kurun waktu tertentu disuatu wilayah dibagi Jumlah Desa/Kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
				16 Penemuan kasus baru HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS adalah jumlah seluruh kasus baru HIV - AIDS yang ditemukan diwilayah kerja pada krun waktu tertentu.
				17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	Defisini Operasional : Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan Strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota

WISY	MIS	KEBIJAKAN	PROGRAM SIF/LESS		SKEN. PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
			JURAHAN	INDIKATOR/INERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				18 Persentase posyandu pumama dan mandiri	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Posyandu Pumama adalah posyandu dengan frekuensi kegiatan lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata kadernya 5 orang atau lebih dan cakupan program Desa atau Kelurahan UCI adalah Desa/Kelurahan dimana 280% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dan lam kurun waktu 1 tahun Jumlah Posyandu (Pumama+Mandin) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Posyandu yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
				19 Cakupan kelurahan siaga aktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Kelurahan Siaga yang aktif dibagi Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk kali 100%
				20 Cakupan rumah tangga ber PHBS	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS adalah Rumah Tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator yakni pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dirumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok didalam rumah. Jumlah Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Rumah Tangga yang dipantau/disurvei di wilayah pd kurun waktu yang sama
				21 Persentase keluarga memiliki sanitasi lingkungan dan terjangkau air bersih	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Adalah jumlah keluarga yang memiliki sanitasi lingkungan dan terjangkau air bersih Jumlah Keluarga yang memiliki sanitasi lingkungan dan terjangkau air bersih pada periode waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh keluarga yang diperiksa
				22 Peningkatan angka penemuan malaria	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Angka Penemuan Malaria adalah jumlah penderita positif malaria (dengan pemeriksaan sediaan darah) yang ditemukan dalam Jumlah penderita positif malaria yang ditemukan pada kurun waktu tertentu disuatu wilayah dibagi Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama Penddk
				23 Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Desa atau Kelurahan UCI adalah Desa/Kelurahan dimana > 80 % dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam kurun wktu satu tahun. Jumlah Desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Desa/kelurahan disuatu wilayah kerja pada waktu yang sama

MISI (1)	MISI (2)	KEBIJAKAN (3)	PROGRAM STRATEGIS		AKTIF PENANGGUNG JAWAB (6)	PETERANGAN (7)
			URAIAN (4)	INDIKATOR KINERJA (5)		
				24 Puskesmas berstandar ISO 9001:2008	Dinas Kesehatan	Definisi Operasional : Adalah suatu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Kualitas Puskesmas. Jumlah Puskesmas berstandar ISO 9001:2008 pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas
			3 Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama	1 Jumlah kerjasama dengan pelaku seni dan budaya (sanggar seni)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kerjasama dengan Sanggar Seni di kota Makassar untuk menampilkan Seni dan Musik Tradisional Khas Kota Makassar
				2 Peningkatan jumlah LPM Aktif	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah LPM yg aktif dibagi jumlah LPM se Kota makassar
				3 Persentase penanggulangan penurunan kemiskinan	BPM, Sosial, Kesehatan, PU, Tenaga kerja, Kelautan, Bagian Hukum, Bagian Kesra	Jumlah KK miskin tahun lalu dikurangi Jumlah KK miskin tahun ini dibagi Jumlah KK miskin tahun lalu dikali 100%
				4 Persentase peningkatan jumlah dana swadaya masyarakat, swadaya masyarakat non material	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dana swadaya tahun ini dikurangi Jumlah dana swadaya tahun lalu dibagi Jumlah dana swadaya tahun lalu
				5 Peringkat TQ tingkat Provinsi Sulawesi	Bagian Kesra	Cukup Jelas
				6 Persentase jamaah haji yang mendapat pelayanan pemberangkatan dan	Bagian Kesra	Jumlah jamaah haji yang mendapat pelayanan dalam pemberangkatan dan pemulangan dibagi Jumlah seluruh jamaah haji yang harus mendapat pelayanan
				7 Persentase rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin yang mendapatkan perbaikan	Dinas Sosial	Jumlah RTLH yang mendapatkan perbaikan dalam 1 tahun dibagi Jumlah RTLH yang seharusnya mendapatkan perbaikan dalam 1 tahun kali 100%
				8 Persentase penurunan anak jalanan/gepeng yang melakukan aktivitas di traffic light	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah anjal/gepeng yang melakukan aktifitas di traffic light dalam satu tahun}}{\text{Jumlah anjal/gepeng yang biasa melakukan aktifitas di traffic light dalam 1 tahun}} \times 100\%$
				9 Persentase PMKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Dinas Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penyuluhan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan penyuluhan sosial dalam 1 tahun
				10 Persentase peningkatan KUBE FM mandiri (terbentuknya kelompok usaha bersama FM dalam pengelolaan usaha	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menjadi peserta KUBE dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta KUBE dalam 1 tahun}} \times 100\%$
				11 Persentase penanganan korban jiwa pada masa tanggap darurat	Badan Penaggulan Bencana Daerah	Jumlah korban jiwa yang mendapatkan bantuan dibagi Jumlah korban jiwa yang terdara kali 100%
				12 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}} \times 100\%$
			4 Pembinaan pemuda dan olahraga	1 Peringkat atlet kota Makassar pada kejuaraan atletik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan olahraga di berbagai aspek masyarakat untuk melahirkan prestasi olahraga di tingkat daerah maupun nasional
				2 Jumlah pemuda pelopor yang mewakili Kota Makassar pada pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bidang kepeloporan antar lain tepat guna, bidang budaya dan pariwisata, bidang kelautan dan kebaharian
				3 Persentase organisasi kepemudaan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jumlah peserta dibagi Jumlah OKP kali 100%

VISI	MISI	KEBIJAKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKOP PENANGGUNG JAWAB	PETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5 Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan	1 Jumlah PUS Pra Sejahtera yang ikut KB 2 Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Pasangan Usia subur (PUS) serta Kualitas Pemakaian 3 Jumlah Kelompok dan Kader Bina Keluarga Balita 4 Jumlah Peserta KB aktif menjadi lestari 5 Persentase perempuan yang duduk di lembaga eksekutif 6 Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh unit pelayanan terpadu	Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Kantor Pemberdayaan Perempuan Kantor Pemberdayaan Perempuan	Jumlah PUS prasejahtera ikut KB dibagi Jumlah seluruh PUS prasejahtera kali 100% Jumlah peserta KB yang aktif dibagi PUS kali 100% Cukup jelas Jumlah peserta KB aktif yang ber KB secara terus menerus tanpa diselingi dengan kehamilan Jumlah perempuan di lembaga eksekutif x 100 % dibagi Jumlah seluruh PNS di lembaga eksekutif Jumlah pengaduan/laporan yang ditangani oleh pelayanan terpadu
	Mewujudkan Ruang Kota yang Ramah Lingkungan	Pengembangan Tata Ruang, dan Lingkungan	6 Penataan ruang	1 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bermohon IMB setiap Tahun 2 Capaian realisasi Target PAD dari IMB 3 Cakupan pelayanan Masyarakat dalam pengurusan IMB 4 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang dalam waktu 5 hari	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan	PAD Tahun berjalan - PAD Tahun lalu x 100/PAD Tahun Lalu Realisasi PAD x 100/Target PAD Dokumen IMB yang terbit x 100 Formulir masuk yang sesuai persyaratan Administrasi dan teknis Tindakan awal terhadap pengaduan dalam waktu 5 hari kerja/seturuh pengaduan x 100
			7 Pembangunan infrastruktur kota	1 Persentase jalan dalam kondisi baik 2 Persentase jembatan dalam kondisi baik 3 Persentase pelayanan bangunan air 4 Persentase drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik 5 Persentase drainase yang dibangun naik 6 cakupan pelayanan air bersih 7 Cakupan pelayanan listrik 8 Presentase kondisi lingkungan perumahan yang baik 9 Persentase jalan bermarka 10 Persentase ketersediaan jembatan penyeberangan dan zebra cross 11 Kepemilikan KEUR angkutan umum 12 Rasio Ijin trayek	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jembatan di daerah tersebut Jumlah pelayanan bangunan air dibagi jumlah pelayanan bangunan air yang direncanakan di kali 100 % Panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh drainase/gorong-gorong di daerah tersebut Panjang drainase yang dibangun dibagi panjang drainase yang direncanakan di kali 100 % Jumlah layanan air bersih pada suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah calon yang membutuhkan pelayanan air bersih. Panjang jalan yang diberi penerangan dibagi Panjang jalan yang harus diberi penerangan Dari hasil survey Environmental Health Resist Assesment (EHRA) dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi TA 2011 oleh Tim POKJA AMPL Kota Makassar Ruas jalan yang bermarka dibagi jumlah ruas jalan di Kota Makassar Jumlah jembatan penyeberangan dan zebra cross dibagi jumlah jembatan penyeberangan dan zebra cross yang seharusnya ada Jumlah angkutan umum yang diKEUR dibagi Jumlah angkutan umum Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk

KSI	LINTAS	KEBIYAKKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			URUTAN	INDIKATOR/INERJIA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				13 Quick respond time kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	QRT = standar Nasional untuk waktu tanggap yang dibutuhkan oleh person li Damkar selama 15 menit mulai dari persiapan, perjalanan samapi dengan aksi pemadaman, sesuai Permen PU No.20/PRT/M/2009 tentang pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan
			8 Pengelolaan lingkungan hidup	1 Penanganan sampah	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	Volume Sampah Yang Ditangani (m3) dibagi Volume Produksi Sampah (m3) kali 100%
				2 Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	Jumlah Daya Tampung TPS (m3) dibagi Jumlah Penduduk kali 100%
				3 Jumlah kelompok pengelola sampah	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	Cukup jelas
				4 Cakupan penghijauan kota	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	Jumlah Pohon yang Ditanam dibagi Jumlah Pohon Yg Harus Ditanam kali 100%
				5 Persentase terumbu karang yang direhabilitasi (Luas daerah rata-rata terumbu karang kota makassar yang mengalami kerusakan 70% atau sebesar 2.177,45 Ha)	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	$\frac{\text{Luas areal terumbu karang yang telah direhabilitasi}}{\text{Luas areal terumbu karang yang mengalami kerusakan.}} \times 100\%$
				6 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Jumlah seluruh perusahaan yang wajib dokumen lingkungan kali 100%
				7 Persentase perusahaan yang mengelola limbah B3 yang diawasi	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah perusahaan yang diawasi limbah B3 dibagi Jumlah perusahaan yang terbit izin lingkungannya (dari pusat/provinsi/kota) kali 100%
	Mewujudkan Peran Strategis Makassar Dalam Perekonomian Domestik dan Internasional	Penguatan Struktur Ekonomi	9 Peningkatan komoditi unggulan	1 Peningkatan pemasaran komoditi hasil perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Kuantitas pemasaran komoditi hasil perikanan tahun ini - Kuantitas pemasaran komoditi hasil perikanan tahun lalu) dibagi Kuantitas pemasaran komoditi hasil perikanan tahun lalu kali 100%
				2 Peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Jumlah konsumsi ikan perkapita tahun ini - Jumlah konsumsi ikan perkapita tahun lalu) dibagi Jumlah konsumsi ikan perkapita tahun lalu kali 100%
				3 Peningkatan produksi perikanan tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Jumlah produksi perikanan tangkap tahun ini - Jumlah produksi perikanan tangkap tahun lalu) dibagi Jumlah produksi perikanan tangkap tahun lalu kali 100%
				4 Peningkatan produksi budidaya perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Jumlah produksi budidaya perikanan tahun ini - Jumlah produksi budidaya perikanan tahun lalu) dibagi Jumlah produksi budidaya perikanan tahun lalu kali 100%
				5 Peningkatan produksi tanaman pangan dibanding tahun lalu	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Jumlah produksi tanaman pangan tahun ini - Jumlah produksi tanaman pangan tahun lalu) dibagi Jumlah produksi tanaman pangan tahun lalu kali 100%
				6 Penurunan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	(Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun lalu - Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun ini) dibagi Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun lalu kali 100%
				7 Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ini - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun lalu) dibagi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun lalu kali 100%
				8 Peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun lalu) dibagi Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun lalu kali 100%
				9 Potensi objek wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tempat wisata yang dijadikan pusat kegiatan atau event-event bertaraf nasional dan internasional
				10 Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Hotel, Hiburan, dan Restoran/RM)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terdaftar sesuai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
			10 Peningkatan ketahanan ekonomi	1 Jumlah produksi setengah jadi & produk jadi produk penyamakan kulit	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	Cukup jelas

VISI	MISI	KEBIJAKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKOP PERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2 Persentase peningkatan jumlah pedang kuli lima dan asongan yang telah di bina	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	(Jumlah PKL yang dibina thn ini - Jumlah PKL yang dibina thn lalu) dibagi Jumlah PKL yang dibina thn lalu kali 100%
				3 Presentasi Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen yang dapat	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	Jumlah pengaduan konsumen yang terselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk
				4 Presentasi peningkatan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak konsumen	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	(Jumlah pengaduan thn ini- jumlah pengaduan thn lalu) dibagi Jumlah pengaduan thn lalu
				5 Ketersediaan pangan	Kantor Ketahanan Pangan	Jumlah produksi dikurangi (stok akhir - stok awal) ditambah impor kemudian dikurangi ekspor - ketersediaan energi = ketersediaan pangan/kapita/hari dibagi 100 kali kandungan kalori dikali bagian yang dapat dimakan (BDD)
				6 Persentase rumah tangga rawan pangan	Kantor Ketahanan Pangan	Jumlah Rumah tangga Rawan pangan/Jumlah Penduduk x 100 %
				7 Persentase penurunan penduduk rawan pangan	Kantor Ketahanan Pangan	Perhitungan tingkat kerawanan pangan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria yaitu penduduk sangat rawan, penduduk pangan resiko sedang, penduduk tahan pangan.
				8 Persentase koperasi yang melakukan RAT	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT dibagi Jumlah Koperasi Kota Makassar kali 100%
				9 Persentase koperasi yang aktif	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi aktif dibagi Jumlah Koperasi Kota Makassar kali 100%
				10 Cakupan koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan database koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan database
				11 Persentase koperasi berprestasi	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah koperasi yang diberikan penghargaan dibagi Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kali 100%
				12 Persentase koperasi dan UKM yang melakukan pembayaran bantuan dana bergulir	Dinas Koperasi dan UKM	KUKM yang melakukan pembayaran dibagi Jumlah KUKM yang menerima bantuan kali 100%
				13 Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM	Koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan dibagi Jumlah koperasi aktif kali 100%
			11 Pengembangan investasi dan regulasi usaha	1 Persentase peningkatan nilai investasi PMDN	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	(Nilai investasi PMDN thn ini - Nilai Investasi PMDN thn lalu) dibagi Nilai investasi PMDN thn lalu kali 100%
				2 Persentase peningkatan nilai investasi PMA	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal	(Jumlah investasi PMA thn ini- jumlah investasi PMA thn lalu) dibagi Jumlah Investasi PMA thn lalu kali 100%
			12 Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi kali 100%
				2 Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker terdaftar kali 100%
				3 Persentase perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan standar K3 dibagi Jumlah perusahaan yang terdaftar kali 100%
				4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek dibagi Total jumlah pekerja/buruh yang terdaftar kali 100%
				5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dibagi Jumlah kasus yang berhasil dilaporkan kali 100%
				6 Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja	Cukup jelas
				7 Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	Cukup jelas

(1)	MISI	KEBIJAKAN	PROGRAM STRATEGIS		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas	Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas Korupsi	13	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1 Persentase data dan laporan yang disusun tepat waktu Bappeda	Jumlah data dan laporan yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah seluruh data dan laporan yang harus disusun (Penyusunan LAKP, Tapkin dan LKPJ berdasarkan PP no.8 tahun 2008, permenpan no.29 tahun 2010 dan Pp no.3 tahun 2007)
					2 Persentase kesetaraan program RKPD dengan RPJMD Bappeda	Jumlah program prioritas dalam RKPD dibagi Jumlah program prioritas dalam RPJMD kali 100%
					3 Persentase SKPD yang melakukan kegiatan sesuai dengan aliran kas Bappeda	SKPD dan unit kerja yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan aliran kas dibagi Jumlah SKPD dan unit kerja kali 100%
			14	Peningkatan profesionalisme aparatur	1 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat pimpinan _____ x 100 % Jumlah seluruh Pejabat
					2 Persentase penempatan pejabat SKPD yang telah menggunakan analisa jabatan, standar jabatan, standar kompetensi jabatan dan analisis beban kerja Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah penempatan Pejabat yang telah menggunakan analisa jabatan, standar jabatan, standar kompetensi jabatan, analisa beban kerja _____ x 100 % Jumlah seluruh Pejabat
					3 Persentase pejabat dengan kualifikasi S1 Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah pejabat dengan kualifikasi S.1 _____ x 100 % Jumlah seluruh Pejabat Struktural
					4 Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugasnya Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugas Pejabat Struktural _____ x 100 % Jumlah seluruh
					5 Persentase promosi dan penempatan PNS dalam jabatan struktural sesuai kompetensi melalui baperjakt Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang mendapatkan promosi dalam jabatan Struktural sesuai kompetensi melalui Baperjakt _____ x 100 % Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural
					6 Persentase capaian tingkat kelulusan peserta diklat yang diharapkan Badan Diklat	Jumlah peserta diklat yang lulus dibagi Jumlah seluruh peserta diklat kali 100%
			15	Pengelolaan keuangan daerah	1 Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan	(Target PAD thn ini- Target PAD thn lalu) dibagi Target PAD thn lalu kali 100%
					2 Peningkatan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan setiap tahunnya Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan	(Target pendapatan thn ini- Target pendapatan thn lalu) dibagi Target pendapatan thn lalu kali 100%
					3 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Bagian Keuangan	Cukup jelas
			18	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Penerbitan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Capil	Cukup jelas
					2 Penerbitan KK Dinas Kependudukan dan Capil	Cukup jelas

(1)	MISI	KEBIJAKAN	URAIAN	PROGRAM STRATEGIS		KETERANGAN		
				INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
				3	Penerbitan Dokumen Akta Capi	Dinas Kependudukan dan Capi	Cukup jelas	
				4	Penerbitan KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Capi	Cukup jelas	
				5	Prosentase Kepemilikan KTP	Dinas Kependudukan dan Capi	Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP kali 100%	
				6	Prosentase Kepemilikan Akta Capi	Dinas Kependudukan dan Capi	Jumlah Kpemilikan Akta Capi dibagi Jumlah penduduk kali 100%	
				7	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai standar waktu	Dinas Kependudukan dan Capi	Jumlah penerbitan Dokumen kependudukan/standar waktu penerbitan	
				8	Persentase akta capil yang terbit sesuai standar waktu	Dinas Kependudukan dan Capi	Jumlah penerbitan Dokumen kependudukan/standar waktu penerbitan	
				9	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Kantor Pelayanan Perizinan	Diperoleh dari hasil survei	
				10	Persentase pengaduan atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti	Kantor Pelayanan Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	
				11	Persentase jumlah izin yang terbit yang diproses sesuai dengan standar waktu	Kantor Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang terbit yang diproses sesuai dengan standar waktu dibagi Jumlah seluruh izin yang terbit dikali 100%	
			17	Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi	1	Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan KIM dan P2WKSS	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keterwakilan Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinaan KIM dan P2WKSS dibagi jumlah Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar yang seharusnya
					2	Persentase peningkatan pengunjung web site kota makassar	Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data	(pengunjung website thn ini- pengunjung website thn lalu) dibagi pengunjung website thn lalu kali 100%
					3	Persentase peningkatan SKPD yang terkoneksi ke website	Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data	Jumlah permintaan sudomain dibagi Jumlah SKPD di Kota Makassar kali 100%
	Mewujudkan Kehidupan Warga Kota Yang Harmonis, Dinamis, Demokratis dan Taat Hukum	Penegakan Hukum dan HAM	18	Pembinaan kehidupan politik yang demokratis	1	Jumlah kegiatan pembinaan partai politik dan ormas	Kantor Kesbang dan Perindungan Masyarakat	Cukup jelas
			19	Peningkatan penegakan hukum dan HAM	1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah	Inspektorat	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dibagi jumlah temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan di kali 100
					2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dibagi jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK di kali 100
					3	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar	Inspektorat	Jumlah penyelesaian kasu pengaduan masyarakat di bagi jumlah kasus pengaduan masyarakat di kali 100.
					4	Pelanggar perda yang diterbitkan	Satpol PP	300 Pelanggaran Perda dan pelaku gangguan Trantibmas/Tahun
					5	Persentase pelanggar perda dan peraturan walikota yang dilakukan penegakan hukum melalui pengadilan	Satpol PP	10 Pelanggaran dan Peraturan walikota yang diprose/Tahun
					6	Persentase pelanggar Perda dan Peraturan Walikota yang dilakukan penegakan hukum melalui pembinaan	Satpol PP	225 Pelanggar Perda dan Perwali yang dibina dalam 1 Tahun
					7	Persentase konflik-konflik pertanahan yang terselesaikan	Bagian Pemerintahan	Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh kasus konflik pertanahan kali 100%
			20	Legislasi daerah	1	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dibagi Jumlah keseluruhan permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum kali 100%
					2	Persentase pra ranperda yang dibahas dan disampaikan ke DPRD dalam bentuk	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah prolegda yang menjadi ranperda dibagi jumlah seluruh prolegda kali 100%

MISI	MISI	MELAKUKAN	URAIAN	PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3 Persentase jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah perda yang disosialisasikan dibagi jumlah seluruh perda yang seharusnya disosialisasikan kali 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN/KOTA : Makassar
 SKPD : Sekretariat Daerah Kota Makassar
 Unit Kerja : Bagian Hukum

NO.	SKPD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
25	Sekretariat Daerah Kota Makassar (Bagian Hukum)	Terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan penegakan hukum dan hak azasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase prolegda yang menjadi ranperda - Persentase legal drafting yang diselesaikan - Persentase perkara gugatan terhadap Pemerintah Kota yang terselesaikan - Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum - Persentase perda yang disosialisasikan 	Subbagian Perundang-un Subbagian Perundang-un Subbagian Bantuan Huku Subbagian Bantuan Huku Subbagian Dokumnetasi Informasi Hukum	Laporan kegiatan Laporan kegiatan Laporan kegiatan Laporan kegiatan Laporan kegiatan	